



**ANALISIS KEPUTUSAN KEPALA DESA DALAM PENGALOKASIAN
DANA DESA UNTUK PENDIDIKAN STUDI KASUS DESA DI
KECAMATAN PRAYA BARAT**

*ANALYSIS OF VILLAGE HEAD DECISIONS IN ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS FOR
EDUCATION CASE STUDY OF VILLAGES IN PRAYA BARAT DISTRICT*

Lalu Alimudin¹, Yupiatul Azizah², Mohammad Mustari³

Universitas Mataram

Email: lalimudin7@gmail.com¹, yupiatulazizah94@gmail.com², mustari@unram.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa untuk sektor pendidikan di Kecamatan Praya Barat. Pengalokasian dana desa merupakan kebijakan yang dapat memengaruhi perkembangan berbagai sektor, termasuk pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen anggaran desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, untuk mengidentifikasi pola pengalokasian dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, seperti renovasi gedung sekolah dan pengadaan alat pendidikan. Selain itu, dana desa digunakan untuk pemberian insentif bagi guru honorer. Namun, pengalokasian dana desa dalam sektor pendidikan masih terfokus pada pembangunan fisik dan kurang memperhatikan pengembangan kualitas pengajaran, seperti pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Faktor yang memengaruhi keputusan Kepala Desa termasuk musyawarah desa dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyarankan agar pengalokasian dana desa lebih seimbang antara pembangunan fisik dan pengembangan kualitas pendidikan, serta perlunya peningkatan kapasitas pengelola desa dalam merencanakan dan menggunakan dana desa secara efektif.

Kata Kunci: Keputusan Kepala Desa, Pengalokasian Dana Desa, Pendidikan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Village Head's decisions in allocating village funds for the education sector in the Praya Barat District. The allocation of village funds is a policy that can impact the development of various sectors, including education. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with the Village Head, village officials, community leaders, and document analysis of the village budget. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis to identify patterns in the allocation of village funds. The results show that most of the village funds are allocated for improving educational facilities, such as renovating school buildings and providing educational tools. Additionally, village funds are used to give incentives to honorary teachers. However, the allocation of village funds in the education sector is still focused on physical development and lacks attention to improving teaching quality, such as teacher training and curriculum development. Factors influencing the Village Head's decision include village deliberations and applicable government policies. This study suggests that village fund allocation should be more balanced between physical development and quality education improvement, along with enhancing the capacity of village managers to plan and utilize village funds effectively.

Keywords: Village Head's Decision, Allocation of Village Funds, Education.

PENDAHULUAN

Keputusan Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa memainkan peranan

penting dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, terutama di sektor pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa, dana desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana ini digunakan untuk berbagai sektor, salah satunya pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam hal pendidikan, dana desa bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, memperbaiki kualitas pengajaran, dan menjamin akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak-anak desa.

Pendidikan di desa sering menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan anggaran dan fasilitas. Daryono (2022) mengungkapkan bahwa sektor pendidikan di desa kerap terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang berkualitas, serta kurangnya dana untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, pengalokasian dana desa untuk pendidikan menjadi sangat vital. Keputusan Kepala Desa dalam pengelolaan dana ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima anak-anak desa dan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pengalokasian dana desa untuk sektor pendidikan tidak hanya bergantung pada besar dana yang diterima oleh desa, tetapi juga pada kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa dalam merencanakan dan menggunakan dana tersebut secara bijaksana. Anisa, Noor, dan Nugroho (2024) menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang baik dalam alokasi dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Kebijakan yang tepat dalam

pengalokasian dana akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak desa.

Tantangan lainnya dalam pengalokasian dana desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Mangopo, Samad, dan Mujahid (2024) menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan di tingkat desa sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jika masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan, keputusan yang diambil oleh Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa untuk pendidikan akan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Kepala Desa di Kecamatan Praya Barat dalam pengalokasian dana desa untuk sektor pendidikan, serta untuk menggali dampaknya terhadap kualitas pendidikan di desa. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa adalah bentuk kebijakan hukum yang dibuat oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan wewenang sesuai aturan yang berlaku. Keputusan ini meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan desa, pembangunan, dan



pemberdayaan masyarakat. Sebagai instrumen resmi, keputusan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan kearifan lokal. Selain itu, pedoman teknis terkait keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Proses pembuatan keputusan Kepala Desa melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat desa. Kepala Desa kemudian menyelenggarakan musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta elemen masyarakat untuk membahas solusi yang diusulkan. Setelah kesepakatan dicapai, rancangan keputusan disusun, disahkan dalam dokumen resmi, dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan dukungan. Keputusan yang biasanya diambil mencakup penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), alokasi dana desa untuk infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan terkait isu sosial di desa.

Keputusan Kepala Desa memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan pembangunan berbasis partisipasi. Studi yang dilakukan oleh Fadhli and Annisa (2024) menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

meningkatkan efektivitas kebijakan desa dan partisipasi warga secara aktif. Selaras dengan itu, Liani dan Takari (2024) menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui keputusan Kepala Desa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, keputusan Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas kebutuhan desa tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.

Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa merujuk pada proses pembagian dan pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk mendukung desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum yang mendasari pengalokasian dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa wewenang untuk mengelola dana tersebut secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa mengatur cara pembagian dana desa, sementara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan panduan lebih lanjut terkait tata kelola dana desa dari perencanaan hingga pelaporan.

Pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kebutuhan desa yang mendesak. Dana ini dibagi menggunakan formula yang mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Ada dua komponen utama dalam pengalokasian dana desa, yaitu



alokasi dasar, yang diberikan secara merata kepada seluruh desa, dan alokasi formula, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Dana desa ini kemudian digunakan untuk empat prioritas utama: pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, serta penanganan bencana dan situasi darurat desa.

Pengalokasian Dana Desa memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam pembangunan desa. Penelitian oleh Masrani, Suyuthi, Djabar (2024) mengungkapkan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk infrastruktur telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil turut berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, meskipun ada banyak manfaat, pengelolaan Dana Desa juga menghadapi sejumlah tantangan. Risma (2024) menyebutkan bahwa masalah yang muncul terkait dengan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan rendahnya tingkat transparansi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pendampingan guna memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidikan

Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk kehidupan sosial. Pendidikan ini tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui interaksi dalam keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan

individu yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terampil, mandiri, serta memiliki karakter bangsa yang kuat. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka siap menghadapi tantangan global dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. (Calista 2024) menekankan bahwa pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter sosial yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, pendidikan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, tanpa terkecuali latar belakang sosial dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas juga dapat mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing individu.

Di Indonesia, pendidikan saat ini mengacu pada model Kurikulum Merdeka, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan potensi mereka. (Susandi and Pohan 2024) mengungkapkan bahwa kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, berbasis pada pengembangan karakter, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Meskipun perkembangan dalam penerapan kurikulum ini sudah ada, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kualitas pendidikan yang belum merata. Keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar di beberapa



daerah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis keputusan Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa untuk sektor pendidikan di Kecamatan Praya Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa dan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya yang turut berperan dalam proses pengalokasian dana desa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, keputusan yang diambil, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa dalam sektor pendidikan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana desa, seperti anggaran desa, laporan kegiatan, dan kebijakan terkait.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi akan dikelompokkan dan

dianalisis berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat induktif, di mana kesimpulan akan ditarik dari data yang ada, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa untuk pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut terhadap kualitas pendidikan di desa.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian data. Peneliti juga akan melakukan verifikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil sesuai dengan kondisi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta analisis terhadap dokumen anggaran dan laporan kegiatan, ditemukan beberapa temuan penting yang dijelaskan berikut ini.

Pengalokasian Dana Desa untuk Pendidikan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Kepala Desa di Kecamatan Praya Barat mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti perbaikan gedung sekolah, pengadaan alat pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk memberikan insentif kepada guru honorer yang mengajar di sekolah dasar dan menengah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di



desa, yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana desa. Buge et al. (2024) menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan.

Namun, meskipun sebagian besar dana desa dialokasikan untuk pembangunan fisik, terdapat kendala dalam pengalokasian dana untuk sektor lain seperti pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Ini mencerminkan adanya kecenderungan untuk lebih fokus pada infrastruktur fisik dibandingkan dengan aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kualitas pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan Syaguni (2024) yang menyatakan bahwa dana desa sering kali lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, sementara sektor lain, seperti pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas pendidikan, sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa menjelaskan bahwa mereka merasa terbatas oleh regulasi yang ada dalam penggunaan dana desa, yang sering kali mengharuskan dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang lebih terukur secara fisik. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk menyelaraskan penggunaan dana desa dengan kebutuhan pendidikan di desa, seperti perbaikan fasilitas sekolah dan insentif bagi guru. (Muhtar 2024) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengharuskan alokasi dana desa untuk program fisik sering kali mengabaikan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, padahal peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik tetapi juga pada kualitas pengajaran dan pengelolaan pendidikan itu sendiri.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Kepala Desa

Pengambilan keputusan oleh Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam desa itu sendiri (faktor internal) maupun yang datang dari luar desa (faktor eksternal). Secara internal, Kepala Desa menggunakan musyawarah desa sebagai forum utama untuk menyusun prioritas alokasi dana desa, dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini, musyawarah desa berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kesepakatan mengenai prioritas pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurut (Claudia, Tokan, and Niron 2024) musyawarah desa adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan, dapat terakomodasi dengan baik.

Namun, meskipun musyawarah desa dilakukan, beberapa Kepala Desa mengungkapkan bahwa keputusan akhir dalam pengalokasian dana desa tetap berada di tangan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai bagaimana dana desa harus digunakan dan adanya tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan sektor tertentu. Faktor eksternal juga memengaruhi pengambilan keputusan, terutama kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai pengalokasian dana desa yang sering berubah-ubah.

Keputusan Kepala Desa juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pengetahuan pribadi dalam mengelola anggaran, serta pemahaman mereka terhadap kebutuhan sektor pendidikan di desa. Oleh karena itu, Kepala Desa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan yang ada serta menggunakan dana desa secara optimal untuk kepentingan



masyarakat. (Hamid et al. 2024) menekankan pentingnya kemampuan Kepala Desa dalam menilai kebutuhan yang lebih mendesak di sektor pendidikan dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dampak Pengalokasian Dana Desa terhadap Kualitas Pendidikan

Dari analisis data yang diperoleh, ditemukan bahwa pengalokasian dana desa untuk sektor pendidikan di Kecamatan Praya Barat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru dan renovasi gedung sekolah yang rusak, memberikan suasana belajar yang lebih nyaman bagi siswa. Selain itu, pemberian insentif kepada guru honorer diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah desa. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa dapat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan jika digunakan dengan bijak.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal fasilitas fisik dan kesejahteraan guru, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pengajaran yang belum sepenuhnya maksimal. Menurut Dwipuspitasari dan Yulisma (2024) meskipun ada peningkatan fasilitas fisik, tidak ada jaminan bahwa kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik telah membawa dampak positif dalam meningkatkan fasilitas pendidikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri

melalui program pelatihan untuk guru dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengalokasian dana desa dalam sektor pendidikan. Pertama, Kepala Desa perlu lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa, agar kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan, dapat lebih terakomodasi. Kedua, selain fokus pada pembangunan fisik, perhatian lebih harus diberikan pada peningkatan kualitas pengajaran dan kapasitas guru, seperti melalui pelatihan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terakhir, pengalokasian dana desa untuk pendidikan harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Kecamatan Praya Barat memberikan kontribusi positif terhadap sektor pendidikan, terutama dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah, seperti renovasi gedung dan pengadaan alat pendidikan, serta pemberian insentif untuk guru honorer. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengalokasian dana desa yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal pengembangan kualitas pengajaran dan pembaruan kurikulum. Keputusan Kepala Desa dalam pengalokasian dana desa dipengaruhi oleh musyawarah desa



dan kebijakan pemerintah, yang cenderung lebih memprioritaskan pembangunan fisik daripada sektor pendidikan non-fisik. Oleh karena itu, meskipun dana desa memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan dana tersebut dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh.

Saran

Kepala Desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa agar kebutuhan pendidikan lebih tepat sasaran. Selain pembangunan fisik, penting untuk fokus pada pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang relevan. Pemerintah juga diharapkan memberikan kebijakan yang mendukung dan memperjelas pengalokasian dana desa untuk pendidikan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Praya Barat yang telah memberikan informasi penting dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan saran yang bermanfaat selama proses penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Bunga Milena Noer, Iqbal Noor, and Gatot Wahyu Nugroho. 2024. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon." *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3.

<https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327>.

Buge, Maulina Apriani, Frahmawati Bumulo, Melizubaida Mahmud, Radia Hafid, Sudirman, and Risca Marsanti Halid. 2024. "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango." *Journal of Economic and Business Education* 2 (3).

Calista, Aurelia. 2024. "Pengaruh Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di Sekolah Menengah." *Sindoro Cendikia Pendidikan* 7 (5). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.

Claudia, Flaviani Lazar Tania, Frans Bapa Tokan, and Eusabius Separera Niron. 2024. "Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamabelawa." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>.

Daryono, Firmansayah, Muhammad Bayu, Faizah, Anwar, Choiru, Faziah, Fina Nur, Ahzab, Syarifuddin. 2022. *Konsep Dan Aplikasi Landaan Pendidikan Dalam Sekolah Penggerak*. Lembaga Academic & Research Institute.

Dwipuspitasari, Wahyu, and Afri Yulisma. 2024. "Mewujudkan Visi Sekolah Melalui Penjaminan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (4): 185–202.

Fadhli, Muhammad, and Yulia Annisa. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemetan Sosial Ekonomi." *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 9 (1).



- Hamid, Wahyuniati, Jauharsah, Laode Asfahyadin Aliddin, Sujono, and Sinarwaty. 2024. "Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Pendekatan Pembangunan Zona Integritas Desa (Zides) Di Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (5). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>.
- Liani, Yully, and Dedi Takari. 2024. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022." *Jurnal Syntax Dmiration* 5 (11): 2722–7782.
- Mangopo, Hans, Abdul A Samad, and Mujahid. 2024. "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pada Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 s/d 2022." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 6 (2). <https://doi.org/10.47354/mjo.v5i1>.
- Masrani, Nurmadhani Fitri Suyuthi, and Sadly Abdul Djabar. 2024. "Efektifitas Pelayanan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Paser Utara." *Cite This: J.SST* 4 (1): 26–36. <https://doi.org/10.31960/tea.v5i1>.
- Muhtar. 2024. *Pkl Bermartabat Dan Ekonomi Kerakyatan. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka*.
- Risma. 2024. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Sosialisai Anti Korupsi Di Desa." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6 (10).
- Susandi, and Selamat Pohan. 2024. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Minat Dan Kreativitas Peserta Didik Pada Mapel PAI." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18 (5): 2621–3784. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3784>.
- Syaguni, Asyabri, Yusuf, Wafa, El Fagih Hanif, Monday. 2024. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang. Kalimantan Selatan: Ruang Karya*.

